

**RUMUSAN
HASIL RAPAT KERJA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAKARTA, 17-18 FEBRUARI 2021**

Rapat Kerja Badan Standardisasi Nasional (Raker BSN) Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2021 yang dilaksanakan secara daring (*virtual*) melalui *zoom meeting*. Raker BSN dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, Koordinator, Subkoordinator, Peneliti Utama, Widyaiswara Utama, di Badan Standardisasi Nasional, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

POKOK BAHASAN/ISU
1. ISU STRATEGIS
<p>a. Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu adanya tim antar unit kerja untuk penanganan pemenuhan kewajiban internasional Bidang SPK
<p>b. Kerja Sama Akreditasi Internasional dan Kebutuhan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme pelibatan SDM internal BSN untuk menjadi asesor KAN
<p>c. Pemenuhan Kebutuhan Ketelurusan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan aplikasi SPARTA sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi layanan yang dibutuhkan stakeholder. ▪ Peningkatan layanan kemetrolgion dengan peremajaan alat dan panduan kalibrasi ▪ Infrastruktur kalibrasi di daerah, setiap kabupaten/kota memiliki kalibrasi lokal dan BSN turut berperan serta dalam pembinaannya
<p>d. Pengembangan Standar Nasional Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa hal yang diperlukan sesuai konsep kebijakan nasional SPK: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian/penelitian identifikasi produk/jasa/sistem/proses/personal yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan NSPK 2. Gap ketersediaan SNI yang dibutuhkan masyarakat 3. Perumusan SNI yang belum tersedia ▪ Perumusan <i>simpler, faster, dan better</i> → usulan PNPS di KPPS dengan naskah akademik yang berkualitas
<p>e. Sistem Merit untuk ASN BSN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini BSN telah mempunyai penilai mandiri untuk sistem merit. Pelaksanaan sistem merit secara penuh ditargetkan pada tahun 2025. ▪ BSN memperoleh nilai 261,5 (baik) dalam evaluasi sistem merit oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
2. Pengembangan Standar dan Penerapan Standar
<p>a. Pengembangan Standar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu adanya perbaikan proses bisnis pengembangan standar dengan waktu 3 bulan, dengan memperhatikan flow proses pengembangan standar yang baik dan berkualitas mulai dari kegiatan riset, penerapan standar, akreditasi dan SNSU ▪ Pengoordinasian komtek di K/L, berakhir tahun 2023, sesuai dengan PP 34/2018, untuk itu perlu pengelolaan komtek secara menyeluruh berbasis IT.
<p>b. Penerapan Standar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu penguatan kolaborasi dan partnership dalam penerapan SPK, baik untuk pembinaan penerapan standar dan penyusunan skema. ▪ Perlunya perhatian terhadap penyediaan sumber daya untuk penyelesaian skema penilaian kesesuaian dalam kerangka pemenuhan amanah peraturan perundangan. ▪ Perlunya mendorong peran <i>role model</i> penerap SNI dalam membumikan SNI untuk pemulihan ekonomi nasional. ▪ Kerjasama dengan stakeholder BSN lebih diperluas dan tingkatkan untuk lebih membumikan SPK dengan memanfaatkan 5 KLT BSN.

POKOK BAHASAN/ISU

3. Akreditasi dan SNSU

a. Akreditasi dan sistem akreditasi

- Skema akreditasi untuk memfasilitasi UUCK.
- Proses integrasi Sistem IT Akreditasi dengan pengembangan dan penerapan SNI (New KANMIS, Bang Beni, SISPK, dll).

b. Standar Nasional Satuan Ukuran

- Perlunya peningkatan kemampuan pengukuran dan kalibrasi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas.
- Perlunya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia SNSU dalam mendukung kinerja SNSU.
- Perlunya peningkatan efektifitas layanan SNSU, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

4. Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengawasan Internal

a. Pengembangan SDM

- Penyelesaian Juklak dan Juknis ASTA dan Metrolog.
- Percepatan penerapan Sistem Merit di BSN.
- Penyesuaian kondisi manajemen di era new normal sesuai dengan debirokratisasi.
- Pengembangan kompetensi SDM SPK internal.

b. Penelitian

- Jurnal Standardisasi (JS) ditargetkan untuk masuk dalam indeks jurnal internasional.
- BSN menetapkan target waktu untuk Unit Pembina jabatan fungsional dan akan diselesaikan dalam 5 bulan ke depan.
- Pengembangan pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi tetap dipelihara dengan pemanfaatan aplikasi e-learning.
- BSN mendukung PRN yang sedang dalam proses menjadi revisi PRIN, agar dimonitor perkembangannya.

c. Pengawasan Internal

- Inspektorat menjadi partner unit kerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- Monitoring untuk kegiatan strategis BSN.
- Perlu adanya SDM untuk pengendalian teknis.

5. Program Infrastruktur Fisik, Teknologi Informasi dan Humas

a. Infrastruktur Fisik

- *Roadmap* perpindahan ke gedung baru perlu terus di kawal pelaksanaannya.
- *Chiller* di Gedung SNSU Serpong perlu menjadi perhatian dan akan dilakukan evaluasi berdasarkan hasil konsultan.
- Perlu ditempatkan koordinator dan subkoordinator bagian umum yang memonitor layanan sarpras di Serpong.

b. Teknologi Informasi

- BSN tidak membangun data center tetapi akan melakukan co-location server dan sewa cloud untuk mengantisipasi kebutuhan unit kerja dalam penyimpanan dokumen.
- Perlu sistem IT yang handal dan ditunjang dengan SDM yang kompeten, serta pengawasan dari inspektorat dalam pelaksanaan.
- *Dashboard* yang saat ini harus dapat mengakomodir satu data di BSN. Perlu diperjelas mekanisme update data dan penanggung jawabnya.

c. Humas

- Banyaknya permintaan konsumen atas Standar Internasional tertentu perlu untuk menjadi masukan bagi perumusan SNI.
- Perlu dilakukan kegiatan bedah standar. Perpustakaan dan *SNI corner* menjadi tempat yang menarik untuk belajar SPK.

POKOK BAHASAN/ISU

- Lokasi pelaksanaan kegiatan Bulan Mutu Nasional dan *Indonesia Quality Expo* di Bandung perlu didiskusikan kembali (di Mall atau pusat keramaian lainnya).

Seluruh butir-butir rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Kerja ini akan ditindaklanjuti oleh seluruh PIC yang terkait.

Jakarta, 18 Februari 2021
Sekretaris Utama BSN,

Puji Winarni